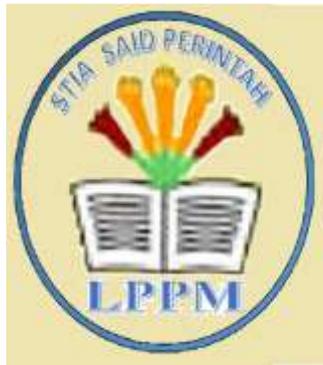


Nabilah Dini Ramadhani¹⁾
Ertien Rining Nawangsari²⁾

**^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**
[**nadiradini964@gmail.com**](mailto:nadiradini964@gmail.com)



LPPM STIA Said Perintah

Volume 4, No. 2, September 2023

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2023 - 06 - 15

Accepted; 2023 - 06 - 30

Published; 2023 - 07 - 03

Abstract

SMPN 28 Surabaya is one of the inclusive education providers that provide innovative Smart Inclusive School (SIS) programs. However, the implementation of the SIS program is still constrained by unsupportive infrastructure and inadequate teacher competence so the implementation of SIS program is not optimal. This study aims to look at the implementation of SIS program at SMP Negeri 28 Surabaya using David C. Korten's program implementation suitability model in which 3 elements are, the programs, implementing organizations, and target groups. In the program element, the implementation of Smart Inclusive School has been well understood and implemented by the school as well as PDBK and parents. the implementing organization element, namely regular teachers and special assistants, has been equipped with training so that there is an understanding of handling Peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). The target group element, namely PDBK and parents, has benefited from the Smart Inclusive School program, although there are still obstacles in adapting the environment for PDBK. Keywords : Public Policy, Program Implementation, Smart Inclusive School (SIS)

Pendahuluan

Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Setiap warga negara berhak atas pendidikan". Sistem pendidikan Indonesia memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, dalam lembaga pendidikan tidak ada alasan untuk menolak perbedaan siswa berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, suku, kelas sosial, ekonomi kemampuan ekonomi atau kegiatan yang bersifat khusus yang memerlukan perhatian khusus. Tujuan pendidikan nasional harus mendorong tercapainya cita-cita bersama pendidikan bermutu nasional. Hal tersebut menjadi dasar munculnya kesempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berupa pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) serta menyelenggarakan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif bagi semua golongan (Ramadhan, 2020). Menurut UU Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menciptakan suasana belajar dengan cara yang terarah dan sadar dan merancang proses pembelajaran sehingga siswa secara aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Pendidikan inklusif seharusnya membawa PDBK ke dalam lingkungan yang normal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengalaman berpikir dan adaptasi bagi siswa secara umum dan untuk meningkatkan keterampilan (Taufik & Rahaju, 2021).

Perhatian terhadap pendidikan inklusif sangat dibutuhkan di Indonesia. Menurut data riset kesehatan dasar 2018 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, 3,3 persen penduduk Indonesia usia sekolah (5-17 tahun) adalah anak berkebutuhan khusus (dikutip dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/>). Secara total, ada sekitar 265.469 anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang memerlukan perhatian untuk mendapatkan perlindungan dan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas (Aulidiyah, 2020). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada usia sekolah atau (5-19 tahun) mencapai 2.197.833 jiwa. Sementara, di tahun yang sama menurut Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek ada sekitar 269.398 anak yang mengenyam pendidikan

di sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah inklusif. Sehingga, baru 12 persen PDBK yang dilayani kebutuhan pendidikannya.

Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang paling mampu melaksanakan pendidikan inklusif sebagai *Learning City* atau Kota belajar dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi menurut *Global Network of Learning Cities* (GNLC) UNESCO pada tahun 2016 (Surya Rosa Putra, 2020). Berdasarkan Forum Komunikasi Sekolah Inklusif Surabaya pada tahun 2018, Jumlah PDBK yang mendapatkan pendidikan inklusif di Kota Surabaya yaitu 2.144 siswa yang tersebar di 51 sekolah dari 5 (lima) wilayah sedangkan jumlah guru pendamping khusus dari Dinas Pendidikan hanya 93 orang dan 90 orang dari bantuan operasional daerah. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Forum Komunikasi Sekolah Inklusif, bahwa;

"Fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung anak-anak, termasuk ruang kelas. Kami hanya memiliki beberapa. Anak-anak membutuhkan keterampilan (terlatih). Sedangkan untuk guru, hanya ada empat Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah tersebut. keadaan menjadi cukup sulit, jika dalam satu kelas terdapat 40 siswa lain maka idealnya setiap kelas harus memiliki GPK." Kata Bapak Matra'i selaku Kepala Forum Komunikasi Sekolah Inklusi Surabaya dalam website *IDNtimes.com* (07/18). (diakses pada 19 September 2022)

Jumlah PDBK tidak sebanding dengan jumlah sekolah umum di 5 (lima) wilayah yang mempunyai layanan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Di tingkat pendidikan SD/MI sekitar 16,2% sekolah negeri yang menawarkan pendidikan inklusif, di tingkat SMP/MTS, sekitar 37,7% sekolah negeri yang menawarkan pendidikan inklusif, dan di tingkat SMA/MA/SMK sebanyak 12.1% (Agustina & Rahaju, 2021). Jenjang Sekolah Menengah Pertama menjadi penyelenggara inklusif terbanyak yaitu Terdapat 25 sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusif dari total 63 SMP Negeri di Kota Surabaya yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan jumlah PDBK sebanyak 985 siswa pada tahun 2019 total 65.510 siswa (Agustina & Rahaju, 2021).

Presentase Sekolah Penyedia Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya Tahun 2019

Jenjang Pendidikan	Presentase (%)
SD/MI	16,2
SMP/MTS	37,7
SMA/MA/SMK	12,1

Sumber; Agustina & Rahaju, (2021)

Faktor yang mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif adalah aksesibilitas sarana dan prasarana sehingga menjadi lebih mudah bagi pengguna, baik siswa umum maupun siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut sesuai pernyataan Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial Indonesia (Forkasi) Kota Surabaya bahwa;

“Untuk wilayah Surabaya Barat, pelayanan pendidikan inklusif masih kurang. hanya diadakan di SMPN 20, SMPN 48, dan SMPN 28 Surabaya. Sampai saat ini, Sekolah inklusi di Surabaya memiliki banyak kekurangan, seperti penyelenggara pendidikan yang tidak bersahabat dengan guru pendamping dari luar, kurangnya perangkat pembelajaran, dan penilaian yang kurang optimal.” Kata Fitriya dari Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial Indonesia (Forkasi) Kota Surabaya (12/2019). (diakses pada 19 September 2022)

Pernyataan diatas membuktikan sebaran sekolah inklusif yang tidak merata di Kota Surabaya menghambat siswa yang berdomisili jauh dari sekolah, ketersediaan sarana prasarana dan jumlah guru masih menjadi permasalahan dalam mendukung proses pembelajaran PDBK di beberapa sekolah di Kota Surabaya yang seharusnya memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, pemerintah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif wajib menyediakan akomodasi sebagai bentuk dukungan dalam memfasilitasi PDBK (Agustina & Rahaju, 2021).

SMP Negeri 28 Kota Surabaya salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif melalui inovasi Program *Smart Inclusive School* (SIS). *Smart Inclusive School* merupakan program unggulan dari SMP Negeri 28 Kota Surabaya guna memetakan PDBK dalam pembelajaran daring pada kelas inklusif penuh yang sudah disepakati di awal tahun pembelajaran 2019/2020 dengan penyesuaian kondisi PDBK. Di tahun 2021/2022 terdapat 30 siswa PDBK mengalami tuna grahita,

low vision dan gangguan emosi. Program *Smart Inclusive School* di SMP Negeri 28 Kota Surabaya memberikan layanan kepada siswa berkebutuhan khusus dengan berbagai karakteristik ketunaan. Pada program ini orang tua sebagai fasilitator, supporter dan mediator antara guru dan peserta didik diberikan panduan dan pelatihan teknik pembelajaran daring melalui *video conference WhatsApp* atau *Zoom meeting*, membuka tugas siswa melalui *microsoft form* dan *sway* dalam pembelajaran daring. Namun, aksesibilitas bagi para PDBK masih belum tersedia dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan pihak sekolah SMP Negeri 28 Kota Surabaya, bahwa;

"Dari jumlah siswa penyandang disabilitas tersebut terdapat ketimpangan sarana dan prasarana pendukung seperti kursi roda yang hanya berjumlah 1 dan belum mendapat bantuan lagi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya." Kata Ibu Dyah selaku Koordinator pendidikan inklusif SMP Negeri 28 Kota Surabaya (10/22). (Wawancara langsung bersama narasumber 14 Oktober 2022)

Sekolah inklusif dituntut untuk melengkapi sarana prasarana khusus bagi PDBK seperti mesin *print braille*, riglet, kruk, kursi roda, serta infrastruktur sekolah yang ramah dan mendukung aksesibilitas bagi siswa PDBK, sekolah juga harus siap dalam menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Namun, tidak semua pengajuan dapat dipenuhi oleh dinas pendidikan dan terkadang akomodasi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan para PDBK (Agustina & Rahaju, 2021).

Kendala lainnya yaitu peran guru reguler yang masih kesulitan memahami dan menerima PDBK dengan alasan belum memiliki bekal dalam menghadapi karakteristik PDBK seperti dalam penelitian (Ningrum & Assjari, 2019) bahwa terbatasnya guru pendamping khusus membuat para guru kewalahan membagi waktu antara pembelajaran reguler dengan kelas inklusi penuh. sehingga banyak siswa yang kurang diperhatikan oleh guru reguler dan mereka cenderung dibiarkan semaunya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan pihak Sekolah SMP Negeri 28 Kota Surabaya bahwa;

"Kehadiran PDBK selalu menjadi bahan perdebatan di ruang guru. Ada yang merasa kasihan, ada yang bingung. Ada pula yang menyarankan PDBK dikembalikan ke SLB saja". Ujar Triworo Parmoningrum Kepala Sekolah SMPN 28 Surabaya (12/21). (diakses pada 26 September 2022)

Kondisi tersebut membuktikan bahwa implementasi program *Smart Inclusive School* belum berjalan dengan baik. Masih terdapat beberapa kendala terkait akomodasi

dan peran tenaga pendidik dalam proses pembelajaran bagi PDBK di SMP Negeri 28 Kota Surabaya (Ningrum & Assjari, 2019).

Tujuan penelitian ini adalah guna mendeskripsikan implementasi *Smart Inclusive School* di SMP Negeri 28 Kota Surabaya dalam kaitannya dengan kebijakan pendidikan inklusif. Teknik implementasi menggunakan teori David C. Korten yaitu model kesesuaian program untuk menilai keberhasilan suatu program berdasarkan tiga elemen implementasi program yaitu program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran (Akib & Tarigan, 2008). Berdasarkan pola tersebut apabila tidak terdapat kesesuaian antara ketiga elemen tersebut maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil dan output program tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kerangka Teoritis

Kebijakan Publik

Menurut (Hamdi, 2015) Kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dinyatakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengelolaan pemerintahan negara. Ciri-ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut. (1) Semua kebijakan publik pasti ditujukan sebagai pemecahan masalah publik. Setiap kebijakan publik dijadikan sebagai upaya kolektif untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat setiap hari. (2) Setiap kebijakan publik berisi model tindakan yang diuraikan dalam bentuk program dan kegiatan. (3) Semua kebijakan publik selalu tertuang dalam hukum positif.

Implementasi Program

Menurut Charles O. Jones dalam (Pamelanintyas, 2019) mengatakan bahwa suatu program merupakan salah satu komponen penting dalam suatu kebijakan. kebijakan publik sebagai kebijakan yang diterapkan dalam praktik sehari-hari sebagai pengganti sebuah tindakan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering disampingkan dengan *goals*, *program*, *decision*, *standar*, *proposal* dan *rencana besar*. Implementasi program merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dari program itu sendiri. Salah satu model implementasi program, yaitu model kesesuaian implementasi program menurut David C. Korten dalam (Andani et al., 2019) yang memiliki 3 (tiga) elemen yaitu;

1. Program, yaitu kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dalam program dengan kebutuhan kelompok sasaran.
2. Organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas-tugas yang ditentukan oleh program dan keterampilan serta pemahaman organisasi pelaksana.
3. Kelompok Sasaran, yaitu kesesuaian antara persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana untuk mencapai hasil program dengan tindakan yang harus dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Program *Smart Inclusive School*

The Upper Canada District School Board (UCDSB) mengembangkan *Smart Inclusive School*, sebuah ide yang berasal sebagai metode untuk mendukung siswa inklusi dan pemrograman bagi siswa berkebutuhan khusus dan memiliki kesulitan berkomunikasi dengan memanfaatkan *smartphone* untuk siswa yang memiliki keterbatasan kemampuan belajar. Tujuan dari adanya *Smart Inclusive School* adalah untuk mendukung komunikasi dan partisipasi untuk siswa dengan kebutuhan khusus secara signifikan pada pemrograman pendidikan inklusif. Implementasi dari *Smart Inclusive* ini menggunakan prinsip penelitian tindakan, sebagaimana semakin banyak ruang kelas dan sekolah, maka semakin terlihat *Output Smart Inclusive* dapat mendukung siswa dengan tantangan yang signifikan dan biasanya dalam mengembangkan kemampuan dan pendidikan siswa dengan tantangan komunikasi yang sulit (Dunn & Inglis, 2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan informasi secara komprehensif dan mendalam tentang implementasi program SIS di SMP Negeri 28 Kota Surabaya. Dalam melakukan penelitian kualitatif, sumber data berupa observasi partisipan yang dilakukan pada 10 Maret 2023 hingga 3 April 2023, wawancara lengkap dan menyeluruh kepada *key informan* yaitu Koordinator Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 28 Kota Surabaya yang digunakan sebagai informasi utama dalam pengumpulan data. Teori yang digunakan yaitu model kesesuaian implementasi program menurut David C. Korten yaitu program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menggunakan analisis berdasarkan temuan-temuan yang telah diperoleh peneliti dari lokasi penelitian, yaitu olahan data dan informasi melalui wawancara dan observasi yang terkait dengan deskripsi bagaimana implementasi dari adanya Program SIS di Sekolah Menengah Pertama 28 Kota Surabaya dengan fokus penelitian menggunakan model kesesuaian implementasi program menurut David C. Korten antara lain;

Program

Indikator program digunakan untuk melihat pengaruh program terhadap kinerja dan bagaimana program menyebabkan perubahan pada kelompok sasaran sehingga memiliki tujuan yang sama. Apabila suatu program tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran program, tentu tidak akan berfungsi secara efektif. Pelaksanaan suatu program dapat dikatakan berhasil jika terdapat kejelasan antara kebutuhan kelompok sasaran dengan program yang diusulkan (Prasetyo & Nawangsari, 2021). Program *Smart Inclusive School* (SIS) diadopsi berdasarkan kebijakan pendidikan inklusif dalam Permendiknas No.70 Tahun 2009, sehingga sekolah wajib menjalankan strategi pelaksanaan program dengan matang dan mampu mengatasi

permasalahan para PDBK. Berikut indikator kesesuaian program dapat terlaksana antara lain;

1. Kejelasan Tujuan yang dicapai dan Kebijakan dalam pelaksanaan program

Kejelasan program dari *Smart Inclusive School* disampaikan melalui kegiatan sosialisasi PDBK dan pertemuan setiap semester oleh koordinator Inklusif di SMP Negeri 28 Kota Surabaya kepada para orangtua/wali murid. Tujuan dan manfaat dari adanya program *Smart Inclusive School* yaitu memberikan layanan kepada siswa yang memiliki ketunaan secara fisik, sosial ekonomi, dan keluarga. Selain itu melalui layanan SIS ini memudahkan para PDBK dalam melaksanakan kegiatan akademis dan non akademis secara langsung maupun pembelajaran jarak jauh, serta membantu para siswa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Koordinator pendidikan inklusif SMP Negeri 28 Kota Surabaya bahwa;

"Lewat sosialisasi kami sampaikan Program SIS ini termasuk program unggulan kami yaitu sebuah pola pendidikan yang melayani peserta didik dari berbagai karakteristik mulai dari berupa ketunaan fisik, terkait ekonomi, sosial, dan keluarga. Kami layani secara inklusif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, jadi sebelum masuk disini (SMPN 28 Kota Surabaya) kami ada LOS (Layanan Orientasi Siswa) disitu kami sampaikan layanan inklusif kepada para orangtua." (Hasil Wawancara, 28 Maret 2023)

Kebijakan yang menjadi dasar dari tercapainya tujuan Program SIS yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Peraturan Walikota No.52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya yang tidak terlepas dari kontribusi Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam membantu sekolah mewujudkan Program SIS menjadi salah satu program unggulan yang ada di SMP Negeri 28 Kota Surabaya dengan memfasilitasi sesuai kebutuhan siswa di SMP Negeri 28 Kota Surabaya.

2. Perkiraan Anggaran (Budget) Pelaksanaan program

Anggaran yang diterima dalam program *Smart Inclusive School* berasal dari Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam penyediaan dana dan sarana prasarana. Secara keseluruhan, anggaran dana BOS tahun 2021 adalah

sebesar Rp 52 Triliun yang dibagikan ke 216 ribu sekolah. Bantuan BOS dibagikan sesuai dengan rombongan belajar (rombel) yang ada di setiap sekolah dan dana tersebut digunakan untuk meng-cover biaya di luar operasional sekolah. Adanya alokasi anggaran tidak terlepas dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah atas dasar usulan yang diajukan dalam bentuk bantuan dana atau sarana dan prasarana. Hal ini berguna dalam mendukung kesiapan sekolah membantu PDBK melakukan kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 28 Kota Surabaya.

3. Strategi Pelaksanaan Program

Peningkatan interaksi sosial menjadi strategi utama kepada PDBK dalam adaptasi di lingkungan sekolah reguler. Hal ini memerlukan peran siswa reguler lainnya yang dapat menjalin toleransi dengan PDBK hal ini bisa tercapai melalui sosialisasi diawal penerimaan peserta didik, strategi lain dari pada program ini memberikan motivasi kepada PDBK dengan melatih keterampilan dan rasa percaya diri. Hal ini sesuai pernyataan koordinator pendidikan inklusif SMP Negeri 28 Kota Surabaya bahwa;

"Jadi siswa PDBK ditingkatkan dalam komunikasi dan interaksinya dengan siswa reguler juga kita mencari apa yang menjadi kelebihannya, jadi kami tidak mencari kekurangan tapi lebih ke kelebihan mereka." (Hasil wawancara, 28 Maret 2023)

Strategi lainnya yaitu berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait kemampuan PDBK dalam mengikuti pembelajaran apakah dari berbagai ketunaan yang dialami para PDBK mampu untuk melaksanakan kegiatan atau perlu adanya bantuan dari pihak lain. Dibuktikan dengan pernyataan staff pendidikan kota Surabaya bahwa :

"Misalkan ada siswa cacat fisik yang butuh penanganan berat nanti pihak sekolah membuat proposal ke dinas tapi kalo dinas gabisa bantu kami usulkan ke dinas kesehatan alat dengar bantu dan sebagainya karna kita kan kerjasama sama dinas kesehatan. Kalau dinas pendidikan gabisa bantu bisa melalui kelurahan setelah itu ke dinas sosial atau dinkes." (Hasil Wawancara, 28 Maret 2023)

Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana program harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam program, agar pelaksanaan program mendapatkan *output* dengan tepat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa, organisasi

pelaksana pada program SIS yaitu peran guru reguler dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Guru reguler berperan memberikan pembelajaran sesuai jadwal tetap sekolah sedangkan guru pendamping khusus mempunyai tugas memberikan pendampingan di luar jam pelajaran wajib. Agar para pelaksanaan program berjalan dengan baik maka para pelaksana harus memiliki pemahaman terhadap para PDBK melalui pelatihan guru reguler dan pendamping khusus seperti yang dijelaskan berikut ini.

1. Pemahaman, pengetahuan dan pendalaman terhadap maksud dari tujuan program

Pelaksanaan program berjalan dengan baik apabila para implementor memiliki pemahaman terhadap karakteristik PDBK. Implementor dari program *Smart Inclusive School* di SMP Negeri 28 Kota Surabaya adalah Guru Pendamping Khusus dan guru reguler. Agar pelaksanaan program berjalan dengan tepat, para guru dan pendamping khusus dibekali dengan pelatihan khusus yang dirancang sebagai pemecah masalah dalam menjawab tantangan guru reguler dan GPK pendidikan inklusif dapat mampu melayani keberagaman peserta didik di kelasnya. Pelatihan dilakukan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan langsung kepada guru dalam identifikasi, menyusun assesmen dan perencanaan matriks pendidikan, serta membuat program pembelajaran individual (PPI). Hal ini dibuktikan dengan pernyataan *key informan* yaitu koordinator pendidikan inklusif di SMP Negeri 28 Kota Surabaya bahwa;

"Kami ada pelatihan pembimbing khusus dari kementerian dan dinas kota Surabaya yang ditujukan ke guru reguler dan guru pendamping khusus yang dari lulusan S1 pendidikan luar biasa seperti saya, dan untuk yang guru mapel mendapatkan pelatihan guru pembimbing khusus dari kementerian dan dinas Kota Surabaya." (Hasil wawancara, 28 Maret 2023)

2. Arah Respon Pelaksana yaitu menerima atau menolak

Respon para pelaksana program yaitu guru reguler dan guru pendamping khusus PDBK dalam menjalankan proses pelaksanaan program *Smart Inclusive School* dinilai telah menerima dan bertanggung jawab sepenuhnya. Proses adaptasi para pelaksana sejak ditunjuknya sekolah SMP Negeri 28 Kota Surabaya sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dan sekolah ramah anak menjadi faktor utama kesiapan para guru melaksanakan program SIS. Koordinasi antar pihak yang baik juga menjadi faktor pendukung dari perkembangan PDBK, dibuktikan dengan para

siswa yang dapat berprestasi di berbagai bidang. Selain koordinasi antara guru dengan PDBK, koordinasi lainnya yaitu bersama para orangtua/wali dengan melaksanakan parenting setiap 3 (tiga) bulan sekali.

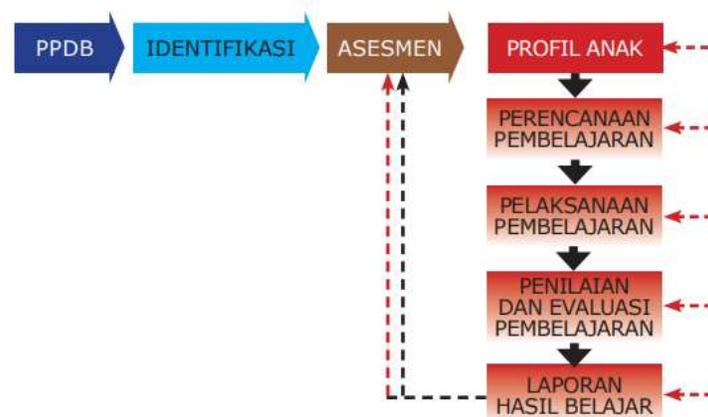
Kelompok Sasaran

Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan capaian yang sudah ditetapkan oleh organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat bagi kelompok sasaran. Jika organisasi pelaksana gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kelompok sasaran tidak dapat menerima *Output* program.

1. Tepat Program

Pelaksanaan program SIS berpedoman pada Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif dari yang bertujuan untuk memandu stakeholder memahami pendidikan inklusi sehingga menjadi pemecah masalah dalam menyediakan layanan pendidikan yang sesuai untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Gambar Alur Penanganan Siswa Pendidikan Inklusif



Sumber; Buku Panduan Pendidikan Inklusif Kemendikbud (Diakses April 2023)

Berdasarkan alur penanganan pendidikan inklusif, bahwa PDBK yang akan mendaftar ke Sekolah penyelenggara inklusi harus melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pasal 11 (b) melalui afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan. Afirmasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik PDBK berdasarkan keterangan dokter dan/ atau dokter spesialis.

2. Tepat Pelaksanaan

Indikator tepat pelaksanaannya bahwa para implementor sesuai dengan program SIS yaitu guru reguler dan guru pendamping khusus. Pada pelaksanaan program SIS pembagian tugas dalam menangani pembelajaran PDBK yaitu guru reguler memberikan pembelajaran reguler kepada seluruh siswa di SMP Negeri 28 Kota Surabaya sedangkan Guru Pendamping Khusus bertugas untuk mendampingi PDBK dan memberikan kelas pendampingan setelah pembelajaran reguler berakhir. Melalui pembagian tugas tersebut memudahkan para PDBK menerima pelajaran serta melalui kelas pendampingan PDBK dapat melatih daya berpikir dan mengembangkan keterampilan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan coordinator pendidikan inklusif di SMP Negeri 28 Kota Surabaya bahwa;

"Jadi ada pemilahan apakah siswa itu inklusif penuh atau pendampingan, jadi kalau inklusif penuh di kelas 7 itu ada step by step yang dilalui saat kita asesmen, saat observasi, biasanya kami lihat anak-anak yang agak berat jenis ketunaanya itu ada evaluasi biasanya. Sehingga kami lebih mudah untuk memilah metode pembelajaran yang akan dipakai" (Hasil Wawancara, 28 Maret 2023)

3. Tepat Sasaran

Sasaran program dilaksanakan melalui PPI (*Individual Learning Program*) dalam satu tahun atau sasaran pendidikan tahunan (sasaran jangka panjang atau tahunan) yang mana merupakan bagian penting dari pembelajaran karena dapat memprediksi program jangka panjang selama operasional sekolah. Kerja sama antara guru dan orang tua harus berlangsung agar tujuan pembelajaran menjadi lebih realistis. Konsep yang dikembangkan melalui analisis karakteristik PDBK digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran untuk mencapai keterampilan yang lebih spesifik. Tujuan pembelajaran ini harus dapat diamati dan diukur, fokus pada PDBK dan mencerminkan pengajaran antara peningkatan keterampilan dan tujuan akhir. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan coordinator pendidikan inklusif bahwa;

"Kami juga mengundang mereka untuk memperkenalkan anaknya kepada sekolah jadi kita ajak bareng bareng trus kita aja parenting disini, penanda tangan PPI (Program Pembelajaran Individual). Lalu kita tanya permasalahannya dirumah lalu setelah disekolah kondisi anaknya bagaimana itu semua kami tuliskan di PPI." (Hasil wawancara, 28 Maret 2023)

4. Tepat Proses

Indikator tepat proses untuk mengetahui antara organisasi pelaksana dan kelompok sasaran memahami bahwa organisasi pelaksana menerima dan melaksanakan program, Sedangkan kelompok sasaran menerima, memahami dan melaksanakan program. Program *Smart Inclusive School* dilaksanakan melalui proses penyusunan berbagai scenario pendidikan dan potensi local bersama para orangtua, tujuannya agar terdapat kesinambungan antara pihak sekolah SMP Negeri 28 Kota Surabaya dengan PDBK dan orangtua. Hal ini sesuai dengan pernyataan coordinator pendidikan inklusif bahwa;

"Kami biasanya koordinasi antara guru pendamping dan guru reguler, jadi saat memasuki PDBK pertama kali ke kelas itu beri tau ke gurunya permasalahan PDBK jika dirasa sulit baru dilimpahkan ke kami (guru pendamping khusus) untuk membantu mendampingi di kelas. Jadi sejauh ini kesiapannya sudah ada dan para guru menerima dengan baik" (Hasil wawancara, 28 Maret 2023)

Kesiapan pelaksanaan program juga dilakukan oleh kelompok sasaran yaitu PDBK dan orangtua. Para PDBK mematuhi dan secara siap melaksanakan Program *Smart Inclusive School* tanpa hambatan dan dapat menerima pelaksanaan program dengan baik. Selain itu orang tua juga memberikan dukungan dengan berkontribusi melaksanakan kegiatan parenting yang diadakan oleh SMP Negeri 28 Kota Surabaya sebagai upaya koordinasi antara guru dengan orang tua. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu orang tua PDBK bahwa:

"Setiap bulan itu saya sama ibunya diundang ke sekolah buat acara parenting, biasanya dikasih arahan gimana mengatasi kayak anak saya gitu kalo dirumah terus cara belajarnya, terus juga di sekolah itu dikasih tau kebutuhan setiap anaknya apa nanti dipenuhi gitu. Acaranya biasanya setelah rapotan pas kegiatan sekolah sudah enggak ada biasanya pasti SMP 28 itu ngundang orangtua. Saya senang sekali ya ada program ini saya jadi gak bingung masalah belajarnya anak saya apalagi jarak sekolahnya dekat dengan rumah." (Hasil Wawancara, 28 Maret 2023)

Berdasarkan kegiatan pada pelaksanaan program *Smart Inclusive School*, peran orangtua dalam memahami dan membantu pelaksanaan program SIS dengan memberikan kontribusi penuh melalui keikutsertaan dalam Sosialisasi PDBK maupun

kegiatan *parenting* secara rutin. Melalui program SIS, orang tua siswa menerima dan mendukung penuh kegiatan PDBK di SMP Negeri 28 Kota Surabaya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program *Smart Inclusive School* di SMP Negeri 28 Kota Surabaya telah dilaksanakan dengan baik dan tepat. Keberhasilan implementasi program *Smart Inclusive School* didasari melalui 3 (tiga) model kesesuaian implementasi program menurut David C. Korten, yaitu program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran.

Elemen program telah berjalan dengan baik dengan adanya Kejelasan tujuan dari program *Smart Inclusive School* yang telah disampaikan dengan baik melalui sosialisasi PDBK dan orangtua mengenai materi dan output yang diterima para PDBK dan orangtua. Elemen organisasi pelaksana yaitu guru reguler dan guru pendamping khusus, telah memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menangani karakteristik PDBK melalui Pelatihan Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif. Sehingga kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana telah berjalan dengan baik dan tepat. Elemen terakhir yaitu kelompok sasaran yaitu PDBK dan orangtua telah disesuaikan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam implementasi program SIS. Sehingga, *output* dari program SIS telah dirasakan oleh PDBK maupun orangtua/wali murid.

Meskipun orang tua telah menerima program *Smart Inclusive School* dengan baik dan secara sukarela mengalihkan seluruh proses pembelajaran kepada SMP Negeri 28 Kota Surabaya, pihak sekolah harus lebih gencar dalam mengembangkan kemampuan siswa di berbagai bidang. Selain itu, Perlu adanya koordinasi lebih lanjut kepada beberapa orangtua yang masih belum memahami bentuk pembelajaran yang diterima PDBK dan memberikan pengarahan lebih lanjut kepada orang tua/wali murid. Sehingga bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan tinjauan pelaksana program dengan orangtua terhadap pemahaman program *Smart Inclusive School* di SMP Negeri 28 Kota Surabaya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Agustina, R. S., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 109–124. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p109-124>
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal*, 1(8), 1–19.
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- Aulidiyah, S. R. R. (2020). *Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Kota Surabaya*. <http://sasanti.or.id/ojs/index.php/hep/article/view/15>
- Dunn, A., & Inglis, A. (2011). Smart Inclusion for the 21st Century Classroom. *Closing the Gap*, 7–11. [www.closingthegap.com, http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/special_ed/closing_the_gap-smart_inclusion_for_the_21st_century_classroom.pdf](http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/special_ed/closing_the_gap-smart_inclusion_for_the_21st_century_classroom.pdf)
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Kementerian PANRB, Jakarta, <https://perpus.menpan.go.id/opac/detail-opac?id=2372>
- Ningrum, K. A., & Assjari, M. (2019). *Inclusion Education , a Study and Critical Analysis with the Dimensions OF Inclusion Index in SMPN 28 Surabaya*. Proceedings of the International Conference on Special Education, Vol. 3, (2019), <https://publication.seameosen.edu.my/index.php/icse/article/view/208>
- Pamelanintyas, R. (2019). Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(3), 230. <https://doi.org/10.21831/sakp.v8i3.15864>
- Prasetyo, K., & Nawangsari, E. R. (2021). Evaluation of the Impact Food Program in Kapas Madya. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 1–11, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/article/view/5144>
- Ramadhan, A. C. (2020). *Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya (Studi Kasus pada Sekolah*

Menengah Pertama Negeri di Surabaya), <https://repository.unair.ac.id/101429/>
Surya Rosa Putra, et al. (2020). *Rekam Jejak 70 Tahun Indonesia UNESCO 1950 - 2020*.
Taufik, A. N., & Rahaju, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk
Mewujudkan Kesetaraan Belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tingkat
SMA di Surabaya. *Publika*, 9(3), 139–154.
<https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p139-154>